

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekuasaan menjadi salah satu fenomena kompleks yang merasuki banyak aspek dalam kehidupan manusia baik dalam ranah politik, ekonomi serta sosial dan budaya. Dalam aspek tersebut terdapat hubungan antara penguasa dan yang dikuasai yang seringkali menjadi fokus dan perhatian bagi disiplin ilmu terkhususnya dalam ilmu sosial, politik dan kultural. Film dokumenter memiliki potensi yang besar untuk menggambarkan bagaimana realitas sosial dan politik menjadi tema yang menarik untuk dieksplorasi secara mendalam.

Film adalah sarana hiburan yang menyajikan beragam cerita dan peristiwa kepada masyarakat umum. Di Indonesia sendiri film adalah salah satu media massa yang sangat besar pengaruhnya bagi masyarakat. Melalui proses penyampaian pesan- pesan, film dapat membentuk pemikiran, nilai, dan sikap. Film yang menginspirasi cenderung bertemakan kisah yang mengharukan sementara film yang mengangkat isu- isu sosial atau politik dapat memicu diskusi dan perubahan. Film dapat membentuk tren konsumsi yang ada di masyarakat. Bukan hanya hiburan atau karya semata, tetapi film dapat merubah masyarakat Indonesia. Menurut Rahayu (2023) kapitalisasi media elektronik telah membawa pengaruh yang menjadikan film sebagai kekuatan dan kemampuan yang dapat menjangkau berbagai segmen sosial sehingga memiliki potensi dalam mempengaruhi khalayak ramai. Denis McQuail menyatakan ada tiga tema besar dalam perjalanan dan perkembangan film yaitu, munculnya aliran-aliran seni pada film, adanya film

dokumenter yang berhubungan dengan sosial, dan juga film sebagai pemanfaatan media dalam politik atau propaganda (Puspitasari, 2013). Film merupakan salah satu saluran media yang sangat banyak dimanfaatkan oleh para elit politik sebagai media keuntungan, keuntungan sebagai suatu individu maupun golongan. Mereka tahu bahwa masyarakat lebih tertarik dengan film sebagai media hiburan mereka. Membuat isi dan cerita yang mampu mempengaruhi cara pandang masyarakat sehingga menggiring opini publik adalah tujuan mereka.

Pada era digital, seperti sekarang ini, teknologi semakin terintegrasi masuk ke dalam kehidupan sehari-hari. Film dokumenter kini dipandang bukan hanya sebatas alat atau media untuk mengabadikan realitas tetapi juga mampu mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap isu-isu yang ada melalui narasi yang kuat. Pengertian film dokumenter dalam kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dokumentasi dalam bentuk film mengenai suatu peristiwa bersejarah atau suatu aspek seni budaya yang memiliki makna khusus agar dapat menjadi alat penerangan atau alat pendidikan (Hermansyah, 2022). Film berpotensi sebagai media untuk memasukkan nilai-nilai pengetahuan sosial, moral, pendidikan dan kebudayaan (Puspitasari, 2013). Dengan demikian nilai-nilai yang ada dalam sebuah film tentunya dapat mempengaruhi pola pikir dalam suatu masyarakat. Banyak cara yang digunakan para pengkritik sosial untuk menyampaikan pesan dan informasi kepada masyarakat melalui media. Salah satunya adalah film dokumenter.

Film dokumenter berbeda dengan film fiksi yang menggunakan cerita dan karakter fiktif. Dalam film dokumenter, pembuat film berusaha untuk memberikan

gambaran yang akurat tentang suatu topik atau isu, baik itu berupa sejarah, kehidupan sosial, alam, budaya, atau topik lainnya.

Film dokumenter merupakan salah satu bentuk film yang tidak hanya sekedar merekonstruksi kejadian tetapi juga mengkonstruksi makna melalui pilihan bahasa, framing, narasi dan juga penyajian data yang berpotensi dapat membentuk persepsi publik tentang kekuasaan. Dalam kerangka Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis/CDA*) Norman Fairclough proses tersebut dipahami sebagai bagian dari praktik wacana yakni bagaimana sebuah teks diproduksi, disusun dan diedarkan dalam konteks sosial tertentu (Kurniantadan & Nursanti, n.d.). *Critical Discourse Analysis* atau CDA memungkinkan peneliti membedah hubungan antara dimensi teks, praktik wacana dan praktik sosial budaya yang saling berinteraksi. Melalui praktik wacana, film dokumenter tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membingkai realitas sosial dan politik dengan cara tertentu sehingga mengarahkan audiens dalam memaknai sebuah pesan. Dimensi teks mencakup pemilihan kosakata, metafora, struktur narasi serta representasi visual yang digunakan dalam film.

Pemilu 2024 telah menarik perhatian media melalui sebuah pengungkapan tentang dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024. Film dokumenter yang berjudul *“Dirty Vote”* memberikan analisis mendalam terhadap situasi politik Indonesia. Beberapa isu yang diangkat dalam film ini berhasil menarik perhatian publik. Dengan melibatkan pakar hukum tata negara serta bekerja sama dengan berbagai lembaga, film ini mengajak masyarakat untuk kembali merenung dan bertindak mengenai persoalan demokrasi di Indonesia. Media online pun turut memberitakan

beragam pandangan yang terbagi, beberapa ada yang pro dan kontra tergantung setiap individu memaknai konsep pesan yang dibentuk dalam film.



Gambar 1.1 Poster Film Dokumenter Dirty Vote 2024

Film dokumenter *Dirty Vote* menceritakan tentang desain kecurangan pemilu 2024 dari sudut pandang para pakar hukum tata negara Indonesia. Film dokumenter *Dirty Vote* dimulai dengan pemaparan tentang bagaimana negara Indonesia telah lama dikuasai oleh rezim otoriter. Film ini menunjukkan bahwa adanya dugaan kecurangan yang dipenuhi praktik kecurangan, intimidasi dan manipulasi untuk memastikan kemenangan penguasa yang sudah berkuasa dalam jangka waktu yang lama.

Dalam tayangan film, terdapat penyalahgunaan kekuasaan yang terlihat nyata demi memperoleh kemenangan. Penyalahgunaan kekuasaan yang dimaksud dalam film tercermin dalam berbagai bentuk seperti manipulasi data pemilih, intimidasi terhadap masyarakat agar memilih calon tertentu serta penggunaan kekuasaan institusi negara untuk mendukung kepentingan politik penguasa. Praktik-praktik yang ada menggambarkan bagaimana pihak yang berkuasa secara sistematis

memanfaatkan posisi mereka untuk mengendalikan jalannya pemilu yang seharusnya berlangsung adil dan bebas. Tidak hanya itu, terdapat juga dugaan penyalahgunaan anggaran negara untuk kampanye yang tidak transparan. Film dokumenter *Dirty Vote* menyoroti bahwa praktik-praktik tersebut tidak hanya merusak integritas pemilu tetapi juga mengancam kelangsungan demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi keadilan dan transparansi.

Dalam film dokumenter *Dirty Vote*, praktik wacana terlihat melalui pilihan diksi para narasumber pakar hukum tata negara, framing isu pemilu serta bagaimana data visual misalnya grafik anggaran baksos atau perangkat visual lain yang direpresentasikan untuk membangun sebuah argumen tertentu.



Gambar 1.2 Screenshot grafik anggaran bantuan sosial di Indonesia tahun 2014-2024 yang ditampilkan dalam film dokumenter *Dirty Vote*

Salah satunya film ini menyoroti peningkatan signifikan dalam alokasi anggaran bantuan sosial (BANSOS) menjelang pemilu. Visualisasi data pada gambar tersebut menampilkan grafik peningkatan anggaran bantuan sosial (bansos) di Indonesia sepanjang periode 2014-2024 dengan penekanan khusus pada lonjakan anggaran yang signifikan menjelang tahun-tahun pemilu. Melalui representasi

visual berupa tumpukan koin yang semakin tinggi pada tahun-tahun pemilu, film ini membangun narasi bahwa kebijakan bansos berpotensi digunakan sebagai alat legitimasi politik oleh penguasa. Penandaan khusus pada tahun-tahun pemilu memperkuat adanya ketertarikan antara peningkatan anggaran bansos dan upaya mempertahankan atau memperoleh kekuasaan politik. Dengan demikian, data ekonomi diposisikan sebagai bukti simbolik yang menantang klaim netralitas dalam penyelenggaraan demokrasi.

Salah satu dialog Bivitri Susanti pada menit 00:35:20 terkait fakta bansos jelang pemilu dalam film *Dirty Vote* yang menyatakan bahwa “*Bansos seharusnya merupakan fasilitas negara yang diberikan berdasarkan struktur kenegaraan bukan sebagai alat politik oleh pejabat tertentu*”, mengungkapkan bahwa peningkatan bansos yang tidak wajar dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang memanfaatkan wacana kesejahteraan sosial untuk tujuan politik tertentu. Melalui uraian tersebut, penelitian ini memandang *Dirty Vote* sebagai teks wacana yang merepresentasikan praktik kekuasaan dalam konteks demokrasi Indonesia, khususnya melalui konstruksi narasi mengenai bantuan sosial dan pemilu.

Para narasumber, Bivitri Susanti, Feri Amsari dan Zainal Arifin Mochtar menggunakan istilah hukum, politik dan etika publik seperti cawe-cewe, penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan serta manipulasi instrumen negara. Dari penggunaan istilah tersebut dapat disimpulkan bahwa diksi tersebut tidak hanya bersifat deskriptif melainkan juga evaluatif yaitu menilai tindakan pemerintah sebagai penyimpangan dari prinsip demokrasi.

Salah satu aspek yang menjadi fokus penyampaian pesan yang terdapat dalam film adalah peran kekuatan besar di balik pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming yang diduga memiliki catatan panjang terkait kecurangan. Film ini menggambarkan bagaimana kedua calon memiliki jaringan politik dan ekonomi yang sangat kuat, yang memberikan kemungkinan bagi kedua pasangan calon untuk mengatur ulang dinamika pemilu demi meraih kemenangan meskipun terdapat banyak indikasi pelanggaran yang merusak tatanan demokrasi yang ada. Selain itu, film ini juga mengangkat putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat usia calon presiden dan wakil presiden yang dinilai tidak lazim dalam praktik ketatanegaraan. Putusan tersebut dipersoalkan karena mengandung konflik kepentingan, mengingat adanya relasi keluarga antara Ketua Mahkamah Konstitusi dan pihak yang secara langsung diuntungkan oleh putusan tersebut.

Mengkaji lebih jauh tentang bagaimana kekuasaan disoroti dalam media khususnya film dokumenter menjadikan alasan peneliti memilih film dokumenter *Dirty Vote*. Secara keseluruhan, film dokumenter *Dirty Vote* menggambarkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan dalam proses demokrasi tidak selalu muncul dalam bentuk pelanggaran hukum eksplisit tetapi juga melalui kepentingan, manipulasi norma dan hukum, penggunaan pengaruh jabatan publik serta pembiaran oleh institusi pengawas. Dengan demikian, penempatan analisis wacana dalam latar belakang ini dapat memperjelas pergeseran fokus dari gambaran kekuasaan secara umum ke mekanisme wacana yang membentuk makna kekuasaan dalam *Dirty Vote* sehingga tujuan penelitian untuk mengungkap bagaimana wacana kekuasaan dibentuk melalui media dokumenter politik menjadi lebih terarah.

Critical Discourse Analysis (CDA) dapat digunakan untuk melihat bagaimana kekuasaan direpresentasikan secara wacana. Pada level teks, film ini menampilkan pilihan kata, visual arsip serta struktur narasi yang membingkai politik tertentu sebagai sesuatu hal yang menyimpang. Pada level praktik wacana, *Dirty Vote* diproduksi dan didistribusikan melalui platform digital yang memungkinkan jangkauan luas serta interaksi dengan publik yang dapat memperkuat wacana. Pada level praktik sosial budaya, film ini hadir dalam situasi politik yang sarat kepentingan dan ketegangan kekuasaan sehingga wacana yang dibangun tidak dapat dilepaskan dari konteks demokrasi dan dinamika kekuasaan yang ada di Indonesia.

Secara teoritis, studi ini relevan karena memperkaya kajian Analisis Wacana Kritis dalam konteks media audio visual khususnya film dokumenter politik. Penelitian ini menunjukkan bahwa wacana tidak hanya dibangun melalui teks verbal tetapi juga melalui kombinasi visual, suara dan narasi yang kompleks. Melalui penerbitan film ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi pemilihan yang netral dan transparan dalam proses politik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; bagaimana wacana kekuasaan dikonstruksi melalui film dokumenter.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui wacana kekuasaan yang terdapat pada film dokumenter *Dirty Vote*
2. Untuk mengetahui bentuk isu-isu kekuasaan pada film dokumenter *Dirty Vote*.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian lazimnya memiliki manfaat baik dalam bidang akademik maupun bermanfaat bagi khalayak umum seperti masyarakat. Dalam penelitian ini manfaat hasil dari penelitian ini yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian-penelitian simbolik serta menjadi kontribusi untuk pengembangan ilmu komunikasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengembangan pada bidang ilmu komunikasi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sebuah pedoman dan pengetahuan yang baru pada dunia akademik mengenai kajian wacana kekuasaan pada film dokumenter *Dirty Vote* yang dikaji dengan menggunakan metode analisis wacana kritis.